

Kisruh Izin Tambang Kerukunan Warga Laman Satong Terancam

Masyarakat Dusun Manjau, Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) hidup tenteram. Kerukunan beragama terlihat dari keharmonisan warga Desa Laman Satong yang terdiri dari Suku Dayak asli dan pendatang dan Melayu. Kelompok masyarakat Dayak, yang merupakan warga mayoritas di Laman Satong menganut agama Kristen sedangkan kelompok Melayu memeluk agama Islam. Kerukunan beragama terlihat dari berdirinya bangunan masjid yang merupakan satu-satunya di Laman Satong. Pembangunan masjid tersebut merupakan prakarsa Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Matan Hilir Utara Ketapang Paulus Untu yang merupakan penganut Kristen.

Pada 2009 PT Laman Mining (LM), perusahaan penambang bauksit, memperoleh izin Bupati Ketapang dengan keluarnya SK 478/2009 yang kemudian diperpanjang dengan SK 217/2011 yang terbit 16 Juni 2011. Berbekal izin dari Bupati Ketapang tersebut, PT LM mengolah areal seluas 20.230 hektare (ha), di mana cadangan terbesar ada di lahan seluas 500 ha di Bukit Pinang, Desa Laman Satong.

Menurut Pemimpin Cabang PT LM di Ketapang, yang beralamat di Jalan Gajah Mada 174 B, Kalinilam, Herry Wibowo pihaknya sudah mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kalbar sejak Agustus lalu dan tinggal menunggu izin produksi. Dikatakan Herry, PT LM memiliki rencana operasi selama 7-10 tahun dengan rencana produksi 1.485.564 ton per tahun yang akan diekspor ke China.

Herry menerangkan lahan tersebut sifatnya sewa pakai. Untuk itu PT LM telah membayar sebesar Rp4 juta per meter kepada pemilik lahan dan akan dikembalikan setelah masa operasi selesai. PT LM juga berjanji akan memberikan bibit karet kepada pemilik lahan untuk reklamasi.

Janji-janji yang disampaikan PT LM bak angin surga bagi masyarakat Dusun Manjau, Desa Laman Satong. Masyarakat asli Dayak memiliki kebiasaan hidup bergantung pada alam dengan berburu dan berpindah ladang.

Menurut Paulus masyarakat Desa Laman Satong sudah lama hidup miskin dan tidak menikmati kemajuan pembangunan. Masyarakat pernah memiliki pengalaman buruk dengan kehadiran PT Marsela, pemilik izin HPH pada era 1990-an. Perusahaan yang *dibekingi* jenderal itu menggarap lahan seluas 90 ribu ha, tapi merusak hutan yang menjadi sumber penghidupan warga sekitar. Saat itu Paulus Untu membawa 70 penduduk desa yang membawa mandau berhasil mengusir PT Marsela dari Laman Satong.

Kehadiran PT LM di Laman Satong diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Bak gayung bersambut, PT LM membangun jalan tanah yang dipadatkan selebar 10 meter dan panjang 5 kilometer. Jalan tersebut membuat perjalanan ke Dusun Manjau, Desa Laman Satong menjadi lebih singkat 2 jam dari sebelumnya yang butuh 3 jam.

Namun, kehadiran perusahaan tambang ini ditentang oleh Forum Generasi Muda Dayak Ketapang (FGMDK). Albertus Jamhari, Ketua FGMDK melayangkan surat kepada BPLHD Kalbar mempertanyakan kegiatan penambangan PT LM yang berpotensi merusak hutan lindung dan kawasan konservasi.

Pasalnya, wilayah operasi PT LM berada di dalam kawasan konservasi, di mana terdapat koridor satwa, seluas 969 hektare yang menghubungkan Taman Nasional Gunung Palung dengan Hutan Lindung Gambut Sungai Putri. Area ini diharapkan menjadi lalu lintas satwa dilindungi yang berada di Taman Nasional Gunung Palung, seperti orangutan (*Pongo pygmaeus wurmbii*).

Kini, masyarakat Desa Laman Satong terancam terpecah. Sebagian mendukung masuknya perusahaan tambang sementara lainnya menentang. Investasi di daerah, khusus Kalimantan memang didominasi sektor hutan dan pertambangan, memang dibutuhkan untuk kemajuan pembangunan. Bupati sebagai pengambil keputusan seharusnya lebih bijak dalam mengeluarkan keputusan menyangkut kawasan strategis.

Manajer Program Perlindungan Satwa, Habitat, dan Legal Yayasan Palung, Tito P Indrawan mengatakan sudah pernah menanyakan kepada Bupati Ketapang Morkes Effendi perihal keluarnya izin penambangan di kawasan konservasi. Namun, tidak ada jawaban yang jelas. Ketika wartawan berusaha menemui, Bupati melalui staf khusus bernama Tugino selalu beralasan sibuk. Bupati seharusnya jangan membiarkan masalah ini menggantung dan terkantung-kantung. Segeralah ambil keputusan yang tegas dan solusi yang tuntas.